FAKTOR PENGUNGKIT DAN STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN OLEH PERKEBUNAN DAN PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BATANG HARI

RAISING FACTORS AND STRATEGIES FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BY PLANTATION AND PALM OIL PLANTATION IN BATANG HARI DISTRICT

Novia Susianti^{1,*}, Sukmal Fahri², dan Abdul Salam³

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Indonesia

²Politeknik Kesehatan Jambi, Kementerian Kesehatan, Indonesia

³Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, Indonesia

^{1,*}Pos el: susiantinovia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received date

22 October 2019

Received in revised form date

27 May 2020

Accepted date

27 May 2020

Available online date

May 2020

Abstrak

Environmental management by the oil palm plantation industry has become a necessity in minimizing negative impacts on the environment that have emerged from the construction to the operation stage. The government has made a preventive effort by requiring every industry performer to manage the environment by following the ownership of the company's environmental documents. However, in reality, there are still companies that have not implemented this effort, including in Batang Hari Regency as the regency with the highest number of oil palm companies in Jambi Province. This study aims to identify the lever factors and environmental management strategies by oil palm industry players in Batang Hari District. Data collection was carried out through in-depth interviews with the government, companies and village communities in the study areas, document review, observation, and focus discussion group (FGD) to the district, sub-district and village government research sites. The determination of priority levers is done by determining the important levers first with an average criterion of $\geq 75\%$, followed by fit/gap analysis by mapping important factors in quadrant I, and strategies to improve environmental management efforts are carried out using a prospective promethee analysis. The results showed that there were three priority lever factors and six factors that were advantages to improve environmental management. The strategy through the Welfare Pluralism (WP) approach is the best approach with the support of the contribution of the nine factors. This approach emphasizes the role of government, companies and communities through the principle of a five-sector approach (public sector, private sector, voluntary sector, mutual aid, and informal sector) in improving environmental management.

Keywords: Environmental Management; Welfare Pluralism; Promethee; Batang Hari District

©2020 Widyariset. All rights reserved

©2020 Widyariset. All rights reserved

DOI: <http://dx.doi.org/10.14203/widyariset.6.1.2020.29-42>

Kata kunci:

Pengelolaan Lingkungan
Pendekatan Lima Sektor
Promethee
Kabupaten Batang Hari

Abstrak

Pengelolaan lingkungan oleh pelaku industri perkebunan kelapa sawit menjadi sebuah keharusan dalam meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan yang telah muncul pada tahap konstruksi hingga operasi. Pemerintah telah melakukan upaya preventif dengan mewajibkan setiap pelaku industri melakukan pengelolaan lingkungan sesuai kepemilikan dokumen lingkungan perusahaan tersebut. Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan perusahaan yang belum melaksanakan upaya tersebut termasuk di Kabupaten Batang Hari sebagai kabupaten dengan jumlah perusahaan sawit terbanyak di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pengungkit dan strategi pengelolaan lingkungan oleh pelaku industri sawit di Kabupaten Batang Hari. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat desa wilayah studi, telaah dokumen, observasi dan *Focus Discussion Group* (FGD) kepada pihak pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintahan desa lokasi penelitian. Penentuan faktor pengungkit prioritas dilakukan dengan menentukan faktor pengungkit yang dianggap penting terlebih dahulu dengan kriteria rata-rata $\geq 75\%$, dilanjutkan analisis fit/gap dengan pemetaan faktor penting yang berada pada kuadran I, dan strategi peningkatan upaya pengelolaan lingkungan dilakukan menggunakan analisis prospektif promethee. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga faktor pengungkit prioritas dan enam faktor yang menjadi keunggulan dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan. Strategi melalui pendekatan *Welfare Pluralism* (WP) merupakan pendekatan terbaik dengan dukungan kontribusi oleh sembilan faktor tersebut. Pendekatan ini mengedepankan peran pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui prinsip pendekatan lima sektor (*public sector, private sector, voluntary sector, mutual aid, dan informal sector*) di dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan.

© 2020 Widyariset. All rights reserved

PENDAHULUAN

Industri perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian (*agro-based industry*) dan memegang peran cukup penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nuryanti 2008). Jumlah produksi industri ini terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Seiring peningkatan produksi dan harga, sumbangan devisa minyak kelapa sawit Indonesia juga meningkat. BPS (2017) menyatakan bahwa total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia cenderung meningkat empat tahun terakhir kecuali tahun 2016. Peningkatan tersebut berkisar 9,44 s.d. 16,06% per tahun, menurun 13,96% tahun 2016, tetapi meningkat kembali sebesar 19,45% di tahun 2017. Gabungan Pengu-

saha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat, hampir semua negara menjadi tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, seperti India, China, Pakistan, Bangladesh, AS, Uni Eropa hingga Afrika (Wahyono, Suntoro, dan Sutarno 2012; BPS 2017; Badrun dan Mubarak 2010; Wigena, Siregar, dan Sitorus 2009).

Sisi lain perkembangan industri ini ternyata menimbulkan dampak negatif. Badrun dan Mubarak (2010) telah melakukan penilaian dampak negatif industri kelapa sawit menggunakan metode penilaian *Life Cycle Assessment* (LCA). Mereka menyatakan dampak negatif industri kelapa sawit telah muncul pada tahap konstruksi hingga operasi berupa debu yang tinggi dan berpengaruh terhadap kesehatan baik pada pekerja maupun terhadap masyarakat

yang berada di sekitar lingkungan. Selain itu, tahapan proses pembukaan lahan, hingga pemanenan akan berpengaruh terhadap kualitas tanah, berkurangnya kemampuan tanah untuk menahan hujan, hilangnya area yang biasanya berguna untuk menjaga kelembapan udara dan tanah, hilangnya tanaman tinggi yang menjaga area tropis menjadi bersuhu tidak terlalu panas dan memengaruhi iklim makro yang pada akhirnya berpengaruh pada perubahan iklim global (Badrun and Mubarak 2010).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberlakukan upaya preventif dengan mewajibkan setiap pelaku industri memenuhi pengurusan izin lingkungan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan salah satunya yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Mukhtasor 2008). Kuhre (1996) dalam Handoko (2017) menyatakan bahwa keberhasilan upaya preventif tersebut tentunya bukan pada terbitnya dokumen kajian lingkungan saja, akan tetapi terletak pada upaya pelaksanaan pelaku industri untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati pada dokumen tersebut (Handoko 2017).

Wikaningrum, Pramudya, and Noor (2015) menemukan tujuh faktor penting dan berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan pada kawasan industri Jababeka Bekasi sesuai Proper KLHK peringkat hijau. Ketujuh faktor tersebut terdiri atas Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan, implementasi program 3R, implementasi konservasi air dan penurunan pencemaran air, alokasi dana konservasi air dan pencemaran air, monitoring dan evaluasi program pengembangan masyarakat, teknologi 3R dan *bechmarking*.

Mengingat kemajemukan tolak ukur yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan, penelitian ini menggunakan kriteria pengelolaan lingkungan dalam Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat hijau yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 (Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2014). Pengelolaan lingkungan melalui pengelolaan dampak penting terhadap aktivitas industri akan sangat menentukan kualitas lingkungan saat ini dan akan datang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam indikator penilaian emas, yaitu inovasi dalam pemanfaatan sumber daya (sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, air dan pengurangan beban pencemaran air, pengurangan pencemaran udara, limbah B3, 3R limbah padat non-B3, perlindungan hayati, pemberdayaan masyarakat), implementasi program pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan hubungan sosial.

Diakui pengelolaan lingkungan pada kawasan industri termasuk industri sawit merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling berinteraksi sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif (Kodrat 2006). Untuk itu, diperlukan analisis atas kondisi yang telah dilakukan serta upaya percepatan pada tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh perusahaan. Banyaknya kendala yang dikemukakan oleh perusahaan yang belum mengimplentasikan dokumen lingkungan yang dimilikinya, termasuk di kabupaten Batang Hari, di mana dari tujuh perusahaan yang memiliki dokumen amdal hanya dua perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Tiga perusahaan telah melakukan pengelolaan tetapi masih terdapat kekurangan pada sarana prasarana dan titik koordinat penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Berbahaya (LB) 3. Selain itu, ditemukan 2 perusahaan yang sama sekali belum melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan (Susianti, dkk. 2018).

Ketidaktahuan apa yang telah menjadi kewajiban dan tertuang di dalam dokumen lingkungan yang dimiliki, kurangnya integrasi *leading sector* dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, kurangnya dukungan manajemen perusahaan terutama kurangnya alokasi dana terkait pengelolaan lingkungan dan masih belum dimilikinya sumber daya manusia (SDM) pengelola lingkungan pada perusahaan merupakan kondisi yang ditemukan. Selain itu, belum diketahuinya faktor-faktor yang dapat mengungkit peningkatan pengelolaan lingkungan hidup menjadi penyebab belum ditaatinya pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Susianti dkk. 2018).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pengungkit pengelolaan lingkungan dan strategi pengelolaan lingkungan oleh perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Batang Hari.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Batang Hari pada bulan Juli s.d. Desember 2018. Kabupaten Batang Hari merupakan kabupaten dengan perkebunan dan pabrik kelapa sawit terbanyak di Provinsi Jambi. Pemilihan perusahaan sebagai lokasi penelitian secara *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu:

1. Perusahaan perkebunan dan PKS yang memiliki dokumen amdal pada kecamatan yang berbeda
2. Perusahaan perkebunan yang juga memiliki pabrik pada kecamatan yang sama, maka yang dijadikan sampel adalah pabrik.
3. Perusahaan sedang dalam keadaan beroperasi, minimal lebih dari satu tahun.
4. Terdapat dokumen pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan lokasi penelitian pada tujuh perusahaan, dengan rincian lima perkebunan dan dua PKS seperti yang terlihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Lokasi Penelitian

No	Nama Perusahaan & Pabrik	Lokasi
1	PT. A	Kec. Muaro Sebo Ulu
2	PT. B	Kec. Muara Bulian
3	PT. C	Kec. Pelayung
4	PT. D	Kec. Maro Sebo Ilir
5	PT. E	Kec. Batin XXIV
6	Pabrik A	Kec. Maro Sebo Ilir
7	Pabrik B	Kec. Bajubang

Sumber: Data Primer, 2019

Pengumpulan data melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan wawancara mendalam, telaah dokumen, observasi dan FGD. Wawancara mendalam dilakukan kepada pihak pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, DPMPTSP, kecamatan dan perangkat desa), pihak perusahaan (manajemen, dan staf pengelola lingkungan), pihak masyarakat desa wilayah studi (kepala desa, tokoh pemuda, perangkat desa, tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan ibu rumah tangga). Telaah dokumen dilakukan untuk memvalidasi data sekunder dan FGD dilakukan kepada pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan, serta pemerintahan desa dengan jumlah 22 orang.

Analisis dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Analisis statistik menggunakan SPSS Versi 23 untuk menentukan faktor-faktor pengungkit berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan kelembagaan. Pengukuran dilakukan berdasarkan skala Likert dengan rentang skala 1 s.d 5 (Sangat Tidak

Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju dan Sangat Setuju). Suatu faktor dikategorikan menjadi penting apabila nilai rata-rata $\geq mean$ (data berdistribusi normal), dan median (data tidak berdistribusi normal).

2. Penentuan tingkat kepentingan faktor pengungkit, dikategorikan menjadi kurang penting (0–74,9%) dan penting ($\geq 75\%$).
3. Analisis fit/gap untuk menentukan faktor pengungkit prioritas dan unggulan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk program melalui pemetaan diagram kurtosis (Kuadran I dan Kuadran II). Pemetaan diagram kurtosis dilakukan dengan menghitung rata-rata dari setiap faktor yang ditemukan berdasarkan sumbu x dan y. Sumbu x yaitu rata-rata tingkat kepentingan faktor, sedangkan sumbu y rata-rata penilaian terhadap potensial program untuk dilaksanakan.
4. Analisis prospektif dengan menggunakan *tools* promethee untuk menentukan strategi terbaik di dalam peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan industri kelapa sawit.
5. Analisis situasional untuk penentuan kriteria evaluasi selain faktor pengungkit dalam pemilihan strategi. Analisis sisuasional merupakan faktor internal perusahaan terdiri dari ketersediaan SDM, peningkatan pendidikan atau kompetensi dalam pengelolaan lingkungan, dan komitmen perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pengungkit Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan oleh Perusahaan di Kabupaten Batang Hari

1. Faktor Pengungkit Ekologi

Berdasarkan analisis penentuan faktor pengungkit aspek ekologi, terdapat tujuh faktor pengungkit yang perlu diperhatikan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Batang Hari. Sedangkan berdasarkan tingkat kepentingan, ditemukan lima faktor $\geq 75\%$, yaitu: (1) implementasi 3R untuk limbah non-B3, (2) implementasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran air, (3) implementasi pengelolaan B3, (4) implementasi pemberdayaan masyarakat, dan (5) implementasi pencapaian efisiensi energi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 1. Grafik Persentase Tingkat Kepentingan Faktor Pengungkit Ekologi

Faktor-faktor aspek ekologi yang mendapatkan penilaian persentase penting tertinggi adalah implementasi *Reduce*, *Reuce*, dan *Recycle* (3R) untuk limbah non-B3. Upaya daur ulang limbah non-B3 pada saat ini memang menjadi pilihan di dalam mengurangi beban lingkungan. Untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan limbah B3, pihak perusahaan dapat melakukan upaya pengurangan limbah B3 dengan menginventarisasi seluruh limbah B3 yang dihasilkan agar dapat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku. Salah satu upaya yang dapat dioptimalkan

adalah mengurangi timbulan limbah B3 berupa oli bekas dan filter bekas dari operasional genset dengan memanfaatkan cangkang dan fiber untuk bahan bakar boiler yang dapat menjalankan turbin sebagai pengganti genset (Septiawan, Hariyadi, and Thohari 2014).

2. Faktor-Faktor Pengungkit Ekonomi

Faktor pengungkit ekonomi yang ditemukan, yaitu delapan faktor, sedangkan yang dianggap penting dengan penilaian, yaitu empat faktor; (a) alokasi dana implementasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran air, (b) alokasi dana implementasi 3R limbah non-B3, (c) alokasi dana implementasi pengelolaan limbah B3, dan (d) alokasi dana implementasi efisiensi energi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 2**.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 2. Grafik Persentase Tingkat Kepentingan Faktor Pengungkit Ekonomi.

Terlihat bahwa pada faktor penting ekonomi yang harus menjadi prioritas perusahaan yaitu terkait meminimalisasi beban lingkungan dari adanya aktivitas industri yang dilakukan. Hal tersebut dinilai selayaknya, mengingat dampak lingkungan juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi industri. Industri pengolahan kelapa sawit akan menghasilkan limbah cair dari pengo-

lahan kelapa sawit yang akan menimbulkan biaya eksternal bagi masyarakat berupa biaya pengganti air bersih dan biaya berobat (Utami, Kumala Putri, and Ekayani 2017).

3. Faktor-Faktor Pengungkit Sosial

Faktor pengungkit sosial yang ditemukan adalah lima faktor, sedangkan yang dianggap penting dengan penilaian $\geq 75\%$, yaitu tiga faktor pengungkit: (a) implementasi program pengembangan masyarakat, (b) monitoring dan evaluasi program pengembangan masyarakat, dan (c) hubungan sosial internal dan eksternal.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 3. Grafik Persentase Tingkat Kepentingan Faktor Pengungkit Sosial

Implementasi program pengembangan masyarakat menjadi faktor sosial terpenting. Hal tersebut menjadi kriteria penilaian emas yang telah diatur di dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan yang dapat dilakukan berupa komitmen perusahaan untuk memecahkan dampak penting yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan yang tecermin dalam kebijakan, struktur organisasi dan keuangan perusahaan. Strategi lain, yaitu menjaga hubungan sosial melalui adanya mekanisme komunikasi dengan masyarakat yang melembaga, program-program pengembangan masyarakat dalam meningkatkan solidaritas sosial masyarakat, serta menjaga konflik-konflik

yang muncul antara perusahaan dengan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun terakhir (Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2014).

4. Faktor-Faktor Pengungkit Teknologi

Faktor pengungkit teknologi yang ditemukan, yaitu lima faktor, dan yang dianggap penting dengan penilaian $\geq 75\%$, yaitu tiga faktor: (a) program 3R limbah non-B3, (b) program pengelolaan limbah B3, dan (c) program konservasi air dan penurunan beban pencemaran air.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 4. Grafik Persentase Tingkat Kepentingan Faktor Pengungkit Teknologi

Sejalan dengan faktor-faktor penting lingkungan dan ekonomi yang ditemukan pada penelitian ini, faktor pengungkit terkait teknologi juga terdapat pada pengembangan teknologi terkait program 3R limbah non-B3. Hal ini menunjukkan terdapat kesamaan komitmen pemerintah dan perusahaan di dalam meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan industri sawit. Melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna tentunya dapat mengungkit pelaksanaan dari upaya tersebut.

5. Faktor-Faktor Pengungkit Kelembagaan

Faktor pengungkit kelembagaan ditemukan empat faktor sementara menurut tingkat kepentingan dengan persentase

$\geq 75\%$ adalah tiga faktor: (a) *benchmarking* tentang energi, air, 3R, pengembangan masyarakat, (b) dokumentasi ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan (DRKPL), dan (c) struktur, tanggung jawab tentang energi, air, 3R, pengembangan masyarakat.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5. Grafik Persentase Tingkat Kepentingan Faktor Pengungkit Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan aspek yang esensial di dalam pelaksanaan serta pengawasan kegiatan industri yang ada di masyarakat yang dapat menimbulkan beban lingkungan yang tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi industri. Untuk itu, kelembagaan yang kuat dan mumpuni sangat dibutuhkan terlebih terkait dengan hal-hal temuan faktor-faktor penting sebelumnya.

Benchmarking diperlukan terutama untuk pengelolaan energi, air, 3R limbah non-B3 dan pengembangan masyarakat sehingga dapat ditentukan batasan keberhasilan dan gagasan pengembangan dalam bentuk inovasi-inovasi.

Pemetaan Faktor Pengungkit berdasarkan Kepentingan dan Potensial Faktor

Faktor-faktor pengungkit yang dianggap penting (13 faktor) selanjutnya dilakukan pemetaan berdasarkan tingkat kepentingan pada sumbu x potensial program pada sumbu y, dengan hasil pemetaan menjadi empat kuadran (I-IV), sebagai berikut.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 6. Pemetaan Faktor-Faktor Pengungkit berdasarkan Kepentingan dan Potensial Program dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Perusahaan terhadap Dokumen Lingkungan di Kabupaten Batang Hari Tahun 2019

Kuadran I ditemukan tiga faktor penting, yaitu; (5) implementasi program pemberdayaan masyarakat (10) hubungan sosial internal dan eksternal, serta (14) program 3R limbah non-B3. Kuadran ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap menjadi prioritas walaupun belum dianggap penting untuk dilaksanakan.

Kuadran II menunjukkan tingkat kepentingan faktor untuk dilakukan cukup tinggi begitupun prioritas untuk dilaksanakan. Ditemukan enam faktor yaitu; (1) implementasi pelaksanaan 3R untuk limbah non-B3, (7) alokasi dana implementasi 3R, (8) alokasi dana implementasi pengelolaan limbah B3, (11) implementasi program pengembangan masyarakat, serta (15) program pengelolaan limbah B3.

Kuadran III menunjukkan faktor pengungkit dianggap penting tetapi masih belum prioritas untuk dilaksanakan, yaitu; (2) monitoring program pemberdayaan masyarakat dan (6) alokasi dana implementasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran air.

Sementara itu, ditemukan enam faktor yang belum dianggap prioritas dan penting pada kuadran IV: (1) implementasi konservasi air dan penurunan beban pencemaran air, (4) implementasi pencapaian efisiensi energi, (9) alokasi dana implementasi efisiensi energi, (13) program konservasi air dan penurunan beban pencemaran air, (16) dokumentasi ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan, dan (17) *Benchmarking* tentang energi, air, 3R, pengembangan masyarakat.

Strategi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan oleh Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Batang Hari

Penentuan strategi peningkatan pengelolaan lingkungan ditentukan berdasarkan faktor yang terdapat pada kuadran I dan kuadran II, yang menjadi faktor prioritas dan faktor yang menjadi keunggulan sehingga dapat dilanjutkan dalam bentuk program dengan jumlah sembilan faktor. Penentuan kriteria evaluasi juga ditetapkan berdasarkan analisis situasional atau kondisi eksisting yang dinilai menjadi sebuah keharusan tetapi tidak semua dimiliki oleh perusahaan, yaitu SDM pengelola lingkungan dengan latar belakang pendidikan ataupun kompetensi khusus dalam bidang pengelolaan lingkungan. Selain itu, juga ditetapkan faktor komitmen perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan sebagai kriteria evaluasi terakhir.

Penilaian kriteria evaluasi diberlakukan pada tiga skenario dalam upaya peningkatan kepatuhan perusahaan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yaitu skenario kondisi *Existing (Status Quo)*, skenario *Command and Control (C&C)* dan skenario *Welfare Pluralism (WP)*. Skenario kondisi *Existing* merupakan skenario dimana tidak diberlakukan intervensi atau upaya apa pun, kondisi yang ada dipertah-

ankan. Skenario *Command and Control* (C&C) merupakan skenario peningkatan kepatuhan perusahaan melalui pengawasan yang ketat dengan pendekatan sistem yang memastikan seluruh entitas yang diatur patuh terhadap peraturan yang ditetapkan.

Skenario WP merupakan pendekatan melalui lima sektor (*Public Sector, Private Sector, Voluntary Sector, Mutual Aid, dan Informal Sector*), dimana negara tidak lagi menjadi aktor tunggal, sektor publik identik dengan kewajiban negara sebagai penanggung jawab utama pencapaian kesejahteraan warga, sektor privat berarti peran swasta yang didorong kuatnya promosi tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*), serta peran masyarakat sipil yang mencakup *Voluntary Sector, Mutual Aid, dan Informal Sector*.

Berdasarkan hasil analisis, perbandingan antara ketiga pendekatan di atas, yaitu *Status Quo*, *C&C*, dan *WP* menghasilkan *partial ranking* sebagaimana Gambar 7.

Pada Gambar 7, sebelah kiri menunjukkan pola pendekatan berdasarkan ϕ^+ (*leaving flow*) sedangkan bar sebelah kanan menunjukkan urutan peringkat berdasarkan ϕ^- (*entering flow*). Berdasarkan hal tersebut, analisis Promethee I yang ditunjukkan ϕ^+ menunjukkan pendekatan

welfare pluralism berada pada peringkat teratas disusul oleh pendekatan *command and control*. Analisis pada ϕ^- menunjukkan urutan tersebut tidak mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan kekuatan dari pendekatan keterlibatan lima sektor mendominasi pola yang lain.

Hasil peringkat Promethee I di atas diperkuat oleh hasil analisis Promethee II (*complete preorder*), yang didasarkan pada *net flow (best-compromise solution)* dalam menentukan pemeringkatan. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pendekatan *WP* merupakan pola yang mempunyai nilai terbesar dibandingkan pendekatan yang lain. Oleh karena itu, diketahui bahwa pola pendekatan *WP* mendominasi pola yang lain. Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis Promethee II menggambarkan pendekatan *WP* merupakan pendekatan terbaik dibandingkan *C&C* dan *Status Quo*.

Hasil analisis juga memberikan ilustrasi tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing pola pendekatan. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 menunjukkan bahwa pendekatan *C&C* yang memiliki keunggulan pada faktor SDM, implementasi pemberdayaan masyarakat, monitoring eva-

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 7. Partial Ranking dan Complete Ranking

luasi program pemberdayaan masyarakat, faktor-faktor 3R limbah non-B3 (program, implementasi, dan alokasi dana), program limbah B3 dan terdapatnya komitmen perusahaan. Akan tetapi, memiliki kelemahan dari sisi hubungan sosial internal maupun eksternal perusahaan ke masyarakat, implementasi dan alokasi dana pengelolaan limbah B3.

Pendekatan C&C melalui penguatan pengawasan berupaya menciptakan sistem yang mampu menerapkan sanksi yang cukup keras melalui institusi pengawas yang kuat baik dari sisi SDM, keuangan maupun perusahaan. Pendekatan ini akan efektif apabila entitas patuh pada sistem. Akan tetapi, sistem ini menimbulkan konsekuensi terutama dari sisi biaya dan energi yang cukup besar, selain profesi pengawas yang saat ini masih kurang, hanya 30% PPLH yang aktif dari 82% PPLH yang berada di provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, pendekatan *WP* merupakan pendekatan terbaik dari hasil penelitian ini untuk mengungkit peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan terhadap pelaksanaan dokumen lingkung-

an yang dimiliki, dengan keunggulan pada semua faktor. Kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan salah satu bentuk perwujudan sikap atau perilaku sehingga solusi perubahan perilaku merupakan solusi terbaik dengan mencari *bright spots* (mencari praktik-praktik terbaik dari kelompok itu sendiri) yang kemudian ditularkan ke kelompok yang lain. Pendekatan *WP* merupakan pendekatan yang memegang prinsip bahwa negara tidak lagi menjadi aktor tunggal, melainkan melalui peranan dari lima sektor.

Pendekatan *WP* diharapkan dapat mengatasi kendala yang muncul selama ini apabila peranan terfokus pada satu elemen saja. Elemen pemerintah (*state*) lebih mendasari adanya monopoli kekuasaan, monopoli informasi, ekspansif dan patriarki.

Sementara elemen perusahaan lebih mengarah kepada ranah *profit oriented*. Di sisi lain, masyarakat (sipil) merupakan elemen terlemah yang menjadi objek kekuasaan, patuh pada *state*, dan status quo. Pendekatan *WP* yang mengedepankan peran ketiga elemen pada saat ini merupakan strategi terbaik sehingga dapat

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 8. Kontribusi Faktor Pengungkit yang Menentukan Peningkatan Pengelolaan Lingkungan oleh Perusahaan Kelapa Sawit (Ket: Warna merupakan kelompok grup masing-masing faktor)

mengubah paradigma bagi perusahaan untuk menggeser paradigma *Single Bottom Line* (perusahaan hanya berorientasi profit) menuju *Triple Bottom Line* (3BL) yang bermakna tata kelola perusahaan tidak hanya untuk kepentingan profit semata, melainkan komitmen terhadap lingkungan (planet) dan manusia (*people*) (KemenLH 2012).

Gambaran selanjutnya berdasarkan hasil analisis diketahui opsi pola pendekatan dalam bidang tiga dimensi berdasarkan aksis kriteria. Pendekatan *WP* memiliki banyak keunggulan; SDM, komitmen, implementasi pengelolaan limbah B3, dan alokasi dana pengelolaan limbah B3. Pendekatan C&C yang berdekatan dengan kuadran pada pola WP menunjukkan pendekatan C&C juga memiliki keunggulan-keunggulan. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 9.

Analisis selanjutnya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pendekatan, dilakukan menggunakan peta radar sebagaimana terlihat pada gambar berikut

ini. Terlihat model WP lebih unggul, dengan radar yang melebar ke luar, dengan keunggulan pada alokasi dana pengelolaan limbah B3, pendekatan ini lebih memunculkan adanya komitmen dari perusahaan dalam menjaga lingkungan ekologi dan dalam penyediaan SDM pengelola lingkungan yang ditunjang pendidikan ataupun kompetensi dalam pengawasan lingkungan. Peta radar dapat dilihat pada Gambar 10.

Hasil penelitian menunjukkan peme-
ringkatan pendekatan strategi peningkatan pengelolaan lingkungan yang tertera di dalam dokumen lingkungan, memberi gambaran yang jelas bagi pengambil kebijakan bahwa pola pendekatan yang selama ini dilaksanakan secara parsial kurang menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Sebaliknya, pendekatan yang mengedepankan peran pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan prinsip pendekatan lima sektor (*Public Sector, Private Sector, Voluntary Sector, Mutual Aid, Dan Infor-*

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 9. Proyeksi opsi peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan kelapa sawit

mal Sector) merupakan alternatif terbaik. Sejalan dengan strategi yang dikemukakan oleh Sinaga dan Hendarto (2012) bahwa salah satu strategi kebijakan yang paling dipentingkan adalah menjalin sinergi kebijakan dan meningkatkan komunikasi antara lembaga pemerintah dan legislatif, masyarakat lokal, pengusaha sawit dan responden buruh sawit

Pola ini akan menjamin koordinasi masing-masing pihak yang terlibat sehingga keterpaduan pelaksanaan baik dari sisi pembinaan dan pengawasan akan terwujud dan berkelanjutan, dengan menimbulkan kesadaran mengubah paradigma perusahaan dari *profit oriented* menjadi 3BL yang bermakna tata kelola perusahaan tidak

hanya untuk kepentingan profit semata, melainkan komitmen terhadap lingkungan (*planet*) dan manusia (*people*). Bahwa, tidak akan ada manusia sehat yang hidup di lingkungan yang tidak sehat.

KESIMPULAN

Faktor pengungkit pada aspek ekologi dan sosial merupakan faktor prioritas yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan di kabupaten Batang Hari. Pada aspek ekologi terdapat dua faktor, yaitu implementasi pemberdayaan masyarakat dan program 3R limbah Non-B3, sedangkan faktor aspek sosial, yaitu hubungan sosial internal dan eksternal perusahaan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 10. Peta Radar Pendekatan Strategi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan oleh perusahaan kelapa sawit di kabupaten Batang Hari

Strategi dengan pendekatan yang mengedepankan peran pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui prinsip pendekatan lima sektor (*Public Sector, Private Sector, Voluntary Sector, Mutual Aid, dan Informal Sector*) merupakan alternatif strategi terbaik di dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batang Hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari sebagai pemberi anggaran dalam kegiatan penelitian ini, juga kepada pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi sebagai institusi yang melakukan kerja sama kelitbangan dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrun, Yeeri, dan Mubarak. 2010. "Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan Global." Dalam *Seminar dan Lokakarya Revitalisasi dan Penguatan Jejaring Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Riau*, 171–79. <http://repository.unri.ac.id/>.
- BPS. 2017. "Statistik Kelapa Sawit Indonesia." Dalam *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*.
- Handoko, Fenny C. 2017. "Implementasi Audit Lingkungan pada Industri Perhotelan di Kota Malang." *Parsi-omnia* 3 (3): 57–68.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup." Jakarta.
- Kodrat, K. F. 2006. "Analisis Sistem Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus pada PT Kawasan Industri Medan)." *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014. "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 (879): 2004–6*. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>.
- Mukhtasor. 2008. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Surabaya: Itpress.
- Nuryanti, Sri. 2008. "Nilai Strategis Industri Sawit." *Analisis Kebijakan Pertanian* 6 (4): 378–392.
- Septiawan, Hendra, Hariyadi Hariyadi, dan Machmud Thohari. 2014. "Analysis of Environmental Management Palm Oil Mill Batu Ampar – PT SMART Tbk in the Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 4 (2): 136–44. <https://doi.org/10.19081/jpsl.2014.4.2.136>.
- Sinaga, Dina Meria, dan Mulyo Hendarto. 2012. "Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatra Utara." 1 (2005): 1–13.
- Susianti, Novia, Sukmal Fahri, Abdul Salam, and Hasneli Ridha Daulay. 2018. "Strategi Peningkatan Kepatuhan Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit dalam Kewajiban Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Batang Hari." Laporan Hasil Penelitian.

- Utami, Rany, Eka Intan Kumala Putri, dan Meti Ekayani. 2017. "Economy and Environmental Impact of Oil Palm Plantation Expansion (Case Study: Panyabungan Village, Merlung Sub-District, West Tanjung Jabung Barat District, Jambi)." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 22 (2): 115–126. <https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>.
- Wahyono, Suntoro, dan Sutarno. 2012. "Efektivitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dalam Perlindungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2012." *Jurnal Ekosains* IV (2): 43–52.
- Wigena, I Gusti Putu, Hermanto Siregar, dan Santun R. P Sitorus. 2009. "Desain Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus Kebun Kelapa Sawit Plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau)." *Jurnal Agro Ekonomi* 27 (1): 81–108.
- Wikaningrum, Temmy, Bambang Pramudya, dan Erliza Noor. 2015. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Sesuai Proper Klhk Peringkat Hijau (Studi Kasus di Kawasan Industri Jababeka Bekasi)." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 5 (2): 111–120. <https://doi.org/10.19081/jpsl.2015.5.2.111>.